

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di Kawasan Timur Tengah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwasanya kawasan Timur Tengah memiliki lebih dari setengah total cadangan minyak di seluruh dunia, dan menjadi penentu dari harga minyak dunia.¹ Amerika Serikat kemudian memberikan perhatian cukup serius terhadap kawasan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan beroperasinya sejumlah perusahaan minyak Amerika Serikat di kawasan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga membangun hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara Timur Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan Timur Tengah mengalami berbagai transformasi dan berkembang menjadi kawasan yang konfliktual (*conflictual area*), dan menyebabkan ketidakstabilan kawasan.²

Ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah kemudian berimplikasi terhadap kepentingan Amerika Serikat.³ Untuk menjaga agar kepentingannya tetap seimbang, Amerika Serikat kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk terlibat dan ikut

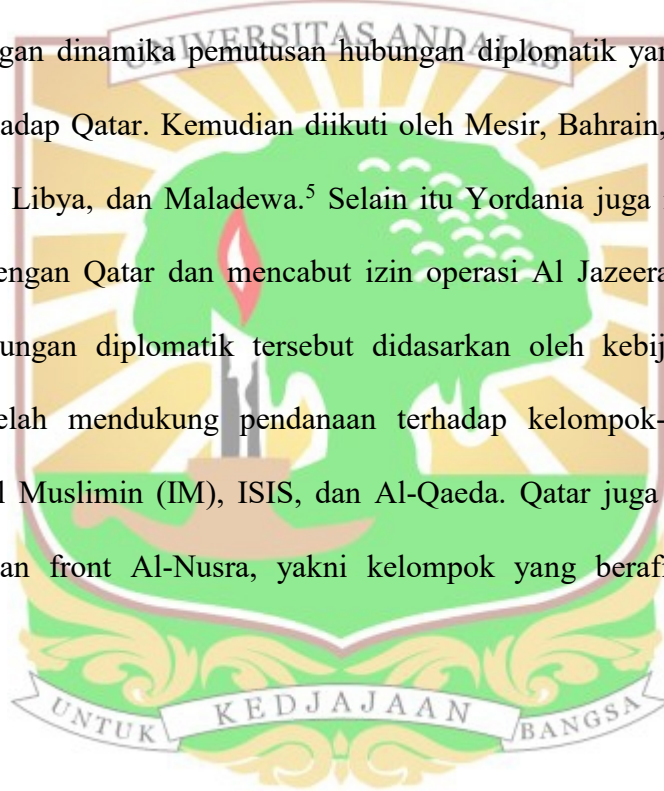
¹ BP (Statistical Review of World Energy). 2002. (London: BP Amoco) p.l.c.

² Bantarto Bandoro. “*Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*”. (Jakarta: CSIS), 1991.

³ Hal Brands. “*Why America Can’t Quit The Middle East*”. Artikel The Caravan. Issues 1921 (Hoover Institution), 2019. <https://www.hoover.org/research/why-america-cant-quit-middle-east> (diakses pada 3 Maret 2020).

campur pada setiap transformasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di kawasan Timur Tengah di antaranya; konflik Arab Saudi dengan Iran, Palestina dengan Israel, Gerakan perlawanan rakyat terhadap rezim (*Arab Spring*), hingga ancaman keamanan global, yakni kelompok terorisme ISIS dan Al Qaeda.⁴

Pada 5 Juni 2017, hubungan negara-negara di kawasan Timur Tengah dihadapkan dengan dinamika pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Kemudian diikuti oleh Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, Libya, dan Maladewa.⁵ Selain itu Yordania juga menurunkan level hubungannya dengan Qatar dan mencabut izin operasi Al Jazeera terhadap Qatar.⁶ Pemutusan hubungan diplomatik tersebut didasarkan oleh kebijakan Qatar yang diindikasikan telah mendukung pendanaan terhadap kelompok-kelompok teroris yakni; Ikhwanul Muslimin (IM), ISIS, dan Al-Qaeda. Qatar juga dituduh memiliki hubungan dengan front Al-Nusra, yakni kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.⁷



⁴ Kholil Arkham Hakim. “Konflik Timur Tengah dalam Perspektif Geopolitik: Studi Kasus Terhadap Islamic State of Iraq and Syria”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) : 3.

⁵ Broto Wardoyo. “Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk”. Artikel *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.7 No.1 April-September. 2018, (Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia), DOI: <https://doi.org/10.18196/hi.71127>. : 81.

⁶ Broto Wardoyo. 2018: 81.

⁷ BBC News Indonesia. “Tujuh Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik: Ada Apa Dengan Qatar?”, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40157225> (diakses pada 21 Januari 2020).

Selain itu media berita milik Qatar, Al Jazeera dinilai terlalu provokatif dalam pemberitaan terjalannya kembali hubungan Qatar-Iran.⁸ Atas dugaan tersebut, Qatar dinilai telah melanggar kesepakatan Gulf Cooperation Council (GCC) dan mengancam stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah.⁹ Selanjutnya, Arab Saudi bersama negara-negara Teluk, melalui organisasi GCC mengajukan 13 poin tuntutan kepada Qatar sebagai prasyarat bagi normalisasi hubungan diplomatik. Poin-poin tersebut di antaranya; penurunan level hubungan dengan Iran; penghentian pembangunan pangkalan militer Turki yang tengah dibangun di Qatar; penghentian dukungan terhadap kelompok teror, sektarian, dan ideologis, serta penghentian operasional kantor berita Al Jazeera.¹⁰ Qatar kemudian membantah setiap tuduhan dan menolak seluruh tuntutan yang ada sebagai hal yang tidak masuk akal, dan melanggar kedaulatan Qatar.¹¹ Qatar justru berpendapat jika pernyataan tersebut adalah rekayasa dan ulah dari suatu komplotan peretas karena tidak didasarkan kepada bukti maupun fakta.

Ketegangan yang terjadi akibat pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Teluk terhadap Qatar membuat Amerika Serikat turut terlibat. Keterlibatan Amerika Serikat, terlihat dari kebijakan luar negeri yang

⁸ Eric Trager. "The Muslim Brotherhood is the Root of the Qatar Crisis". (The Washington Institute), 2017. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhood-is-the-root-of-the-qatar-crisis> diakses pada 21 Januari 2020).

⁹ Novi Rizka Amalia, Siti Latifah Azzahra, dan Wardah Fara Adiba. "Keterkaitan Amerika Serikat dengan Tuduhan Pendanaan Terorisme oleh Qatar". Artikel *Jurnal Dauliyah Vol. 3 No.1 Januari 2018*. (Ponorogo: Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor) : 78.

¹⁰ Al Jazeera. "Arab State Issue 13 Demands to End Qatar-Gulf Crisis", 2017. <http://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html>. (diakses 21 Januari 2020).

¹¹ Khalil E.Jahshan. "Introduction of The GCC Crisis at One Year". (Arab Center Washington D.C. 2918) : 7.

dikeluarkan selama krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi berlangsung. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat ialah pada awalnya Amerika Serikat bergabung dengan aliansi Anti Qatar yang dipimpin oleh Arab Saudi, UEA dan Mesir dalam mengisolasi ekonomi Qatar.¹² Kebijakan ini dikeluarkan pasca kunjungan Presiden Donald Trump ke Riyadh dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam pada bulan Mei 2017. Tepatnya setelah Arab Saudi telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dalam kunjungannya, Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian jual beli senjata senilai 110 miliar USD dengan pemerintah Arab Saudi.¹³ Presiden Donald Trump memberikan dukungan terhadap langkah negara-negara Teluk untuk memblokir ekonomi Qatar. Dukungan tersebut bermula dari pernyataan Presiden Donald Trump, dalam cuitan di akun twitter pribadinya @realDonaldTrump: “So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding.”¹⁴; “...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism.”.

Di sisi lain kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Presiden Donald Trump terhadap krisis tersebut mendapat pertentangan oleh Departemen Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan,

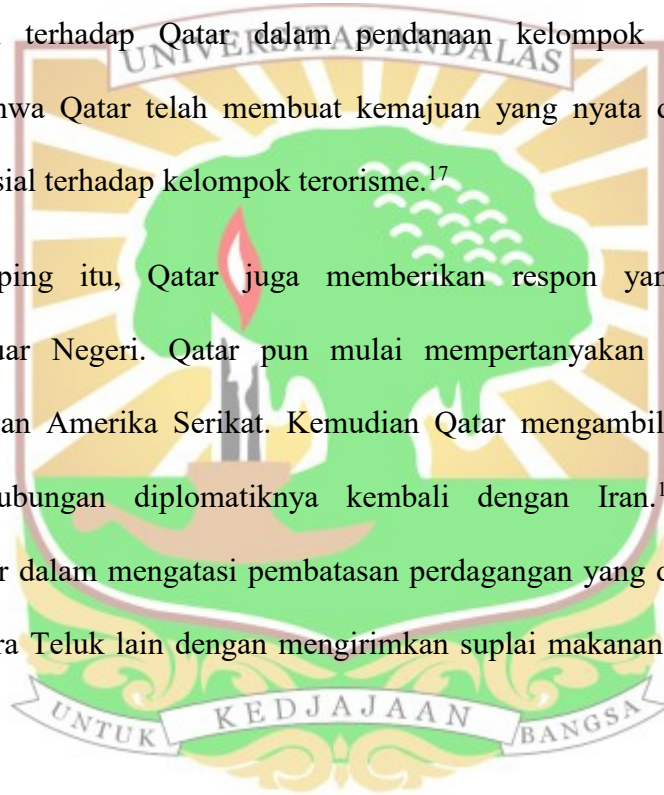
¹² Rami G. Khouri. “U.S Role in Resolving Qatar Crisis Grows”. Artikel *The Cairo Review of Global Affairs*, 2017. <https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/u-s-role-in-resolving-qatar-crisis-grows/> (diakses pada 1 Maret 2020).

¹³ Patsy Widakuswara. “Di Riyadh, Presiden Trump Berupaya Rangkul Muslim”, 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/di-riyadh-presiden-trump-berupaya-rangkul-muslim/3864118.html> (diakses pada 26 Januari 2020).

¹⁴ William Gallo. “Presiden Trump Masuk ke dalam Sengketa Diplomatik Negara-Negara Arab Teluk”, 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-trump-masuk-ke-dalam-sengketa-diplomatik-negara-negara-arab-teluk/3890290.html> (diakses 21 Januari 2020).

James Mattis berpendapat bahwa Amerika Serikat akan berupaya dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi, serta meminta negara-negara Teluk untuk tetap tenang.¹⁵ Tillerson melalui pidatonya di Departemen Luar Negeri menekankan perlunya upaya penyelesaian krisis dengan melibatkan semua pihak melalui jalur mediasi dan rekonsiliasi.¹⁶ Senada dengan Tillerson, Duta Besar Amerika Serikat untuk Qatar, Dana Shell Smith juga menentang kebijakan Presiden Donald Trump terkait tuduhan terhadap Qatar dalam pendanaan kelompok terorisme. Smith mengatakan bahwa Qatar telah membuat kemajuan yang nyata dalam mengekang dukungan finansial terhadap kelompok terorisme.¹⁷

Di samping itu, Qatar juga memberikan respon yang sama dengan Departemen Luar Negeri. Qatar pun mulai mempertanyakan hubungan aliansi negaranya dengan Amerika Serikat. Kemudian Qatar mengambil keputusan untuk memulihkan hubungan diplomatiknya kembali dengan Iran.¹⁸ Iran berperan membantu Qatar dalam mengatasi pembatasan perdagangan yang diberlakukan Arab Saudi dan negara Teluk lain dengan mengirimkan suplai makanan dan mengizinkan



¹⁵ "Press Availability with Secretary of Defense James Mattis, Australian Foreign Minister Julie Bishop, and Australian Defense Minister Marise Payne". (U.S. Department of State). 2017. <http://bit.ly/2qTPX5S> (diakses pada 23 Januari 2020).

¹⁶ Anne Barnard dan David D. Kirkpatrick. "5 Arab Nations Move to Isolate Qatar, Putting the U.S. in a Bind". dalam Artikel The New York Times. 2017. <https://www.nytimes.com/2017/06/05/world/middleeast/qatar-saudi-arabia-egypt-bahrain-united-arab-emirates.html> (diakses pada 23 Januari 2020).

¹⁷ Mark Landler. "Trump Takes Credit for Saudi Move against Qatar, a U.S. Military Partner". Artikel The New York Times. 2017. https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/trump-qatar-saudi-arabia.html?_r=0 (diakses pada 23 Januari 2020).

¹⁸ BBC News. "Qatar restores diplomatic ties with Iran amid Gulf Crisis". 2017. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41035672> (diakses pada 26 Februari 2020).

Qatar Airways untuk melewati wilayah penerbangan Iran.¹⁹ Kedekatan hubungan kembali antara Qatar dan Iran menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat. Dalam hal ini Iran merupakan ancaman keamanan bagi Amerika Serikat dalam visinya memerangi kelompok ekstremis di Timur Tengah.

Pada awal tahun 2018, Amerika Serikat mengubah orientasi kebijakan luar negerinya dengan meminta bantuan Kuwait sebagai mediator dalam proses rekonsiliasi Qatar-Arab Saudi.²⁰ Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri mendesak agar Arab Saudi, UEA, dan negara-negara Teluk lain untuk meringankan sanksi blokade terhadap Qatar. Mengingat Qatar merupakan rumah bagi sekitar 11.000 tentara Amerika Serikat, serta pusat dari Combined Air Space and Space Operation Center (CAOC) milik Amerika Serikat di Al-Udeid dalam mengawasi pergerakan kelompok-kelompok militan seperti ISIS, Al-Qaeda, dan lainnya.²¹

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mendukung Qatar bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya, di mana pada kebijakan sebelumnya, Amerika Serikat cenderung lebih pro terhadap Arab Saudi dan UEA. Sedangkan pada perubahan orientasi kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat memberikan perhatian terhadap Qatar demi menjaga hubungan baik antar negara, salah satunya dengan

¹⁹ "Iran Supplies Continue to Help Ease Qatar Blockade". Artikel Financial Tribune: First Iranian English Economic Daily. 2017. <https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/66531/iran-supplies-continue-to-help-ease-qatar-blockade> (diakses pada 3 Maret 2020).

²⁰ Alessandro Bruno. "Kuwait Mediator in the Gulf Crisis". Artikel South World News. 2017. <https://www.southworld.net/kuwait-mediator-in-the-gulf-crisis/> (diakses pada 3 Maret 2020).

²¹ "The Inconsistency in the US Position and its Potential Repercussions for the Gulf Crisis". Assesment Report Policy Analysis Unit. (Doha: Arab Center for Research and Policy Studies, 2017) : 4.

mengadakan pertemuan berupa dialog strategis untuk memperkuat kerja sama militer dan keamanan Amerika Serikat dan Qatar.²²

Menurut pandangan dari pengamat kebijakan luar negeri Amerika Serikat menilai bahwa perubahan orientasi kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat pada pemerintahan Presiden Donald Trump, terutama dalam menyikapi krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi terkesan tidak konsisten.²³ Terlebih konflik dalam politik domestik Amerika Serikat yang terjadi akibat pertentangan kebijakan antara Presiden Donald Trump dan Departemen Luar Negeri semakin menunjukkan ketidakjelasan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Selain itu perubahan orientasi kebijakan luar negeri juga disebabkan karena adanya pengaruh dari faktor-faktor tertentu.

Melihat fakta di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi.

1.2 Rumusan Masalah

Pada 5 Juni 2017, kawasan Timur Tengah mengalami ketidakstabilan. Pasalnya hubungan negara-negara di kawasan Timur Tengah dihadapkan dengan dinamika pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Negara-negara Teluk lain juga melakukan hal yang sama dengan menurunkan level hubungan

²² Dr Khalid Al-Jaber & Giorgio Cafiero. “*US-Qatar strategic dialogue and the Gulf crisis*”. Artikel The Peninsula: Qatar’s Daily Newspaper. 2018. <https://thepeninsulaqatar.com/opinion/06/02/2018/US-Qatar-strategic-dialogue-and-the-Gulf-crisis> (diakses pada 21 Februari 2020).

²³ Marwan Kaban. “The Gulf Crisis: The U.S. Factor”. Artikel *Jurnal Insight Turkey*, Vol. 20, No. 2. 2018. <https://www.insightturkey.com/file/916/the-gulf-crisis-the-us-factor> DOI: <https://doi.org/10.25253/99.2018202.03>. (diakses pada 23 Januari 2020) : 36.

diplomatknya dengan Qatar. Aliansi Anti Qatar mengajukan 13 tuntutan dan sanksi blokade ekonomi terhadap Qatar, namun Qatar menolak tuntutan tersebut karena tidak ada bukti yang kuat. Ketegangan yang terjadi membuat Amerika Serikat terlibat, dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan presiden Donald Trump, pada awalnya bergabung dengan aliansi Anti Qatar dan mendukung penerapan sanksi blokade ekonomi terhadap Qatar.

Di sisi lain kebijakan luar negeri yang dikeluarkan presiden Donald mendapat pertentangan dari pemerintahannya. Departemen Luar Negeri berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump dapat melemahkan posisi dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Respon yang sama juga diberikan Qatar yang memulihkan kembali hubungan dengan Iran. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat, sehingga mengubah orientasi kebijakan luar negerinya untuk mendukung Qatar demi menjaga hubungan baik kedua negara. Perubahan orientasi kebijakan luar negeri tersebut bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya dan terkesan tidak konsisten. Dalam hal ini terdapat faktor yang kemudian memengaruhi perubahan orientasi kebijakan tersebut, yang didominasi dari faktor domestik. Sehingga hal ini menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, pertanyaan penelitian yang ingin diteliti yaitu: *“Mengapa Amerika Serikat melakukan perubahan*

orientasi kebijakan luar negeri terhadap krisis diplomatik Qatar – Arab Saudi Tahun 2017-2019?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi tahun 2017-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya memiliki beberapa manfaat, baik pada aspek akademis, dan praktis. Manfaat pada aspek akademis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam memahami faktor yang memengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Seperti yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam perubahan orientasi kebijakan luar negeri terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi secara lebih mendalam. Selain itu, manfaat pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembuat kebijakan (*decision makers*) dan pengamat kebijakan dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi negara.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan perbandingan

dengan penelitian ini. Secara umum terdiri dari beberapa bacaan berupa karya ilmiah berbentuk tugas akhir, buku, maupun terbitan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tulisan pertama yang berkaitan dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis diplomatik yang melanda negara-negara Teluk merupakan penelitian yang dilakukan oleh Marwan Kabalan, yang berjudul *The Gulf Crisis: The U.S. Factor*.²⁴ Kabalan dalam tulisannya bertujuan untuk meneliti posisi Amerika Serikat dalam keterlibatannya terhadap krisis diplomatik yang melanda negara-negara Teluk dan perubahan kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump yang tidak konsisten. Temuan dari tulisan Kabalan dalam penelitian ini adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis diplomatik negara-negara Teluk menimbulkan persoalan. Pasalnya Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri yang tidak konsisten. Hal ini terlihat dari perbedaan posisi yang ditunjukkan oleh Presiden Donald Trump yang cenderung mengeluarkan kebijakan dalam mendukung tindakan negara-negara Teluk untuk mengisolasi Qatar atas tuduhan pendanaan kelompok ekstremis. Berbeda dengan Tillerson, bersama Menteri Pertahanan, James Mattis berupaya untuk mendinginkan ketegangan antar pihak. Serta meminta negara-negara Teluk untuk melonggarkan sanksi blokade dan isolasi ekonomi terhadap Qatar, karena dampak negatif dari krisis tersebut cenderung membuat ketegangan semakin panas.

²⁴ Marwan Kabalan. "The Gulf Crisis: The U.S Factor". Artikel *Jurnal Insight Turkey Vol. 20, No. 2*. 2018. <https://www.insightturkey.com/file/916/the-gulf-crisis-the-us-factor>
DOI: <https://doi.org/10.25253/99.2018202.03> (diakses pada 23 Januari 2020) : 33-49.

Presiden Donald Trump tampaknya memainkan peran dalam krisis tersebut berdasarkan kepentingan bisnis. Hal ini dibuktikan melalui upaya intervensi yang dilakukan oleh menantu sekaligus penasihat senior kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump, Jared Kushner. Kushner kemudian dikirim ke negara-negara Teluk pada bulan September 2017 untuk memanggil Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Peranan Kushner sedikitnya juga terlibat dalam kepentingan bisnis yang ingin dicapai oleh Presiden Donald Trump terutama terhadap Qatar dalam kesepakatan *real estate* yang dijalankan keluarganya. Sekaligus untuk mempertahankan elektabilitasnya pada pemilihan presiden mendatang. Fokus penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah konteks bahasan. Dalam tulisan Kabalan penjelasan terbatas kepada bentuk dari perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin menjelaskan analisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi.

Tulisan kedua, dari Mohammed Al-Jarman, yang berjudul *American Policy Dissonance on the 2017 Gulf Crisis*, dalam Jurnal *Global Policy*, pada tahun 2018.²⁵ Al-Jarman dalam tulisannya bertujuan untuk menganalisis prospek disonansi / ketidaksesuaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dalam konteks sikap dan pendekatan yang berbeda antara Presiden Donald Trump dan lembaga pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Temuan dalam tulisan

²⁵ Mohammed Al-Jarman. "American Policy Dissonance on the 2017 Gulf Crisis". Artikel *Jurnal Global Policy*. 2018 <https://www.globalpolicyjournal.com/articles/conflict-and-security/american-policy-dissonance-2017-gulf-crisis> (diakses pada 21 Januari 2020) : 10-17.

Al-Jarman adalah Presiden Donald Trump dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terutama terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, cenderung tidak sesuai dan menimbulkan persoalan dalam lingkup politik domestiknya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya pertentangan oleh Departemen Luar Negeri terhadap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump.

Dalam krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Presiden Donald Trump menurut Departemen Luar Negeri dapat menimbulkan kerusakan substansial pada posisi dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Penyelarasan kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump terhadap Arab Saudi dapat mengancam keamanan nasional Qatar dan hubungan baik antara Amerika Serikat dan Qatar. Dalam hal ini Qatar merupakan mitra strategis Amerika Serikat dalam bidang militer. Hal yang membedakan tulisan Al-Jarman dengan penelitian penulis ialah, cakupan bahasan. Dalam tulisan Al-Jarman memiliki keterbatasan dalam analisis prospek kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tidak sesuai dalam krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menyoroti kepada faktor perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat berimplikasi terhadap hubungan antara Amerika Serikat-Qatar, dan Amerika Serikat-Arab Saudi.

Tulisan ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Novi Rizka Amalia, Siti Latifah Azzahra, dan Wardah Fara Adiba yang berjudul *Keterkaitan Amerika*

Serikat dengan Tuduhan Pendanaan Terorisme oleh Qatar, pada tahun 2018.²⁶ Amalia, Azzahra, dan Adiba dalam tulisannya bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik yang dialami oleh Qatar. Seperti yang telah dipaparkan bahwa krisis diplomatik yang melanda negara-negara Teluk disebabkan oleh adanya tuduhan dari negara-negara Teluk terhadap Qatar. Qatar dituding telah memberikan bantuan finansial serta dukungan terhadap kelompok terorisme. Hal ini dinilai oleh negara-negara Teluk sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Qatar terhadap perjanjian yang disepakati oleh GCC. Sehingga beberapa negara Teluk kemudian mengambil tindakan untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Metode penelitian yang digunakan Amalia dkk adalah metode kualitatif dengan menggunakan konsep realisme neoklasik.

Realisme neoklasik merupakan kombinasi antara realisme klasik dan neorealisme. Di mana dalam menjelaskan politik luar negeri, realisme neoklasik berupaya mengintegrasikan tingkat analisa unit realisme klasik dan tingkat analisa struktur pada neorealisme. Kaum realisme neoklasik berpendapat bahwa dalam politik luar negeri suatu negeri dilihat dari dua inti, yakni kepemimpinan dari kepala pemerintahan dan kekuatan negara dalam aspek keamanan. Jika merujuk kepada krisis yang dialami Qatar adalah terlihat dari adanya kepentingan dua negara besar yakni Arab Saudi dan Amerika Serikat.

²⁶ Novi Rizka Amalia, Siti Latifah Azzahra, dan Wardah Fara Adiba. “*Keterkaitan Amerika Serikat dengan Tuduhan Pendanaan Terorisme oleh Qatar*”. Artikel Jurnal Daulyah, Vol.3 No.1 Januari 2018 (Ponorogo: Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor) : 73-83.

Temuan dalam tulisan ini adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis diplomatik yang melanda negara-negara Teluk terlihat dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang inkonsisten terutama dalam mencapai kepentingan nasional di kawasan Timur Tengah melalui propaganda dengan menjadikan Arab Saudi seolah pionir utama dalam pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Padahal disisi lain Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik dengan Qatar. Terlihat dari keberadaan pangkalan udara serta markas pelatihan utama militer milik Amerika Serikat di Al-Udeid. Hal yang membedakan tulisan sebelumnya dengan penelitian penulis ialah konteks bahasan. Dalam tulisan sebelumnya, melihat keterkaitan Amerika Serikat dalam krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi dari sisi kepentingan yang ingin dicapai, Namun menurut penulis pembahasan mengenai kepentingan Amerika Serikat yang dimaksud di sini masih kurang detil. Sedangkan dalam penelitian penulis, juga akan menjelaskan lebih detail kepentingan seperti apa yang ingin dicapai Amerika Serikat melalui perubahan orientasi kebijakan luar negeri terhadap krisis Qatar-Arab Saudi.

Tulisan keempat, dari Jane Kinninmont, yang berjudul *The Gulf Divided: The Impact of the Qatar Crisis*, pada tahun 2019, terbitan Chatham House.²⁷ Dalam tulisan ini, penulis mengambil rujukan pada bagian pembahasan “*western reticence*”, yang bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan negara Barat seperti Amerika Serikat dalam krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi. Amerika Serikat sebagai aktor eksternal utama

²⁷ Jane Kinninmont. “*Western Reticence*”, dalam Buku “*The Gulf Divided: The Impact of the Qatar Crisis*”. (Chatham House The Royal Institute of International Affairs, 2019). https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-05-30-Gulf%20Crisis_0.pdf (diakses pada 21 Januari 2020) : 32-34.

yang memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah mengambil pendekatan yang tidak konsisten sejak awal terjadinya krisis.

Temuan dalam tulisan Kinnimont adalah meskipun pendekatan yang digunakan Amerika Serikat cenderung tidak konsisten, namun nyatanya Amerika Serikat justru melihat krisis yang melanda negara-negara Teluk sebagai peluang untuk meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan visi perlawanan terhadap kelompok terorisme. Dalam hal ini Amerika Serikat merasa senang jika negara-negara Teluk berselisih secara terus menerus, dengan terjadinya perselisihan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari penjualan senjatanya. Senjata merupakan salah satu pemasok pendapatan terbesar Amerika Serikat selain industri. Menurut penulis, tulisan sebelumnya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perubahan orientasi kebijakan Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, Namun tulisan ini memberikan pandangan lain dari keterlibatan Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi dilihat dalam konteks perdagangan senjata untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Temuan dalam tulisan Kinnimont bisa penulis gunakan sebagai acuan untuk melihat lebih lanjut kepentingan bisnis senjata Amerika Serikat selama krisis berlangsung.

Tulisan terakhir yang penulis gunakan sebagai acuan penelitian adalah tulisan dari Robert E. Hunter, yang berjudul *The Qatar Crisis: Asserting U.S Interests*, pada tahun 2017.²⁸ Hunter dalam tulisannya bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis diplomatik negara-negara Teluk yang menimbulkan

²⁸ Robert E. Hunter. "*The Qatar Crisis: Asserting U.S Interests*". 2017. <https://lobelog.com/the-qatar-crisis-asserting-us-interests/> (diakses pada 21 Januari 2020).

efek terhadap kepentingan Amerika Serikat. Efek tersebut terlihat dari kebijakan Presiden Donald Trump dalam mendukung Arab Saudi mengenai tuduhan dan pelanggaran yang dilakukan Qatar. Dukungan tersebut secara berisiko mempertaruhkan kepentingan Amerika Serikat. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kala itu, Rex Tillerson dalam melindungi kepentingan negara.

Tillerson melakukan serangkaian kunjungan ke Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi untuk mencoba menyelesaikan perselisihan. Singkatnya upaya *shuttle diplomacy* yang dilakukan Tillerson tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan kekacauan politik di Gedung Putih membuat krisis semakin sulit untuk diselesaikan. Temuan dari analisis Hunter dalam tulisan ini adalah terlepas dari apa yang terjadi, pendekatan Amerika Serikat yang tidak konsisten akan berimplikasi terhadap kepentingannya yang menjadi terbatas. Untuk itu Amerika Serikat harus mampu menunjukkan sikap bijaksana sebagai negara besar dan berada pada posisi 'di tengah' melalui serangkaian strategi kebijakan sehingga kepentingan negara tetap stabil dan memiliki pengaruh yang semakin kuat di kawasan. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah fokus yang dibahas dalam tulisan tersebut lebih kepada implikasi keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi yang mengancam kepentingan negara.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan konsep yang dikemukakan dalam tulisan Lawrence R. Jacobs dan Benjamin I. Page yang berjudul,

“Who Influence U.S Foreign Policy”, yakni *Competing Views of Who Influences U.S Foreign Policy*. Pada konsep ini, Jacobs dan Page mengemukakan terdapat tiga indikator yang menonjol dalam memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yakni; *Neoliberal and Organized Groups*, *Epistemic Community and Knowledge-Based Experts*, dan *Median Voter Theory and the Influence of Public Opinion*.²⁹

1.7.1 Neoliberal and Organized Groups

Jacobs dan Page dalam tulisannya menjelaskan bahwa, dalam pengambilan kebijakan luar negeri, kelompok kepentingan menjadi hal yang dipertimbangkan. Banyak sarjana Hubungan Internasional yang mengambil pendekatan neoliberal dalam bidang politik internasional, menekankan pengaruh kelompok kepentingan yang terorganisir dalam menentukan kebijakan luar negeri. Di mana dalam pandangan ini, pejabat eksekutif dan legislatif dengan otoritas kebijakan luar negeri melakukan *bargaining* (tawar-menawar) dengan kelompok domestik untuk memengaruhi manfaat dan biaya bagi pejabat terpilih dalam memilih kebijakan alternatif. Menurut Benditt, kelompok kepentingan didefinisikan sebagai: “a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests”³⁰

²⁹ Lawrence R. Jacobs dan Benjamin I. Page. “Who Influence U.S Foreign Policy”. Artikel *Jurnal American Political Science Review*, Vol. 99, No.1 February, 2005 (Cambridge University Press) DOI: <https://doi.org/10.1017/S000305540505152X> (diakses 12 Februari 2020) : 107-109.

³⁰ Theodore M. Benditt. “The Concept of Interest in Political Theory”. (Political Theory, No. 3, 1975) : 34.

Dari definisi tersebut, fungsi dari kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan. Kelompok kepentingan juga dikatakan sebagai kelompok yang terorganisasi yang mempunyai tujuan bersama secara aktif dan berusaha untuk memengaruhi pemerintah. Dalam hal ini memengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Para analis neoliberal telah memilih kelompok bisnis menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan kelompok bisnis memiliki sumber daya penting untuk menekan pembuat kebijakan (*decision makers*).³¹

Keberadaan kelompok bisnis berhubungan dengan pengaruhnya terhadap ekonomi negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa tekanan pada pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri dalam kepentingan bisnis telah meningkat selama tiga dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan munculnya tatanan ekonomi dunia yang terbuka oleh pergerakan modal internasional secara cepat, serta paparan yang lebih besar terhadap persaingan ekonomi. Singkatnya, para sarjana yang berorientasi pada pengaruh kelompok kepentingan menyarankan bahwa, kelompok kepentingan terutama kelompok bisnis harus memberikan pengaruh kuat pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Beberapa analis neoliberal dalam politik internasional berpendapat bahwa perusahaan dan kelompok bisnis memberikan pengaruh khusus dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Keberadaan perusahaan bisnis dapat memengaruhi partai politik yang berkuasa.

³¹ Lawrence R. Jacobs dan Benjamin I. Page. "Who Influence U.S Foreign Policy". Artikel *Jurnal American Political Science Review*, Vol. 99, No.1 February, 2005 (Cambridge University Press) DOI: <https://doi.org/10.1017/S000305540505152X> (diakses 12 Februari 2020) : 107.

Pada perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, terdapat pengaruh dari kelompok kepentingan, terutama kelompok bisnis. Hal ini terlihat dari usaha Jared Kushner melalui “Kushner Companies” yang berusaha untuk memengaruhi presiden Donald Trump dalam mengambil kebijakan untuk mendukung aliansi Anti Qatar. Jared Kushner merupakan menantu dari presiden Donald Trump dan memiliki otoritas sebagai penasihat senior untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Otoritas tersebut yang kemudian dimanfaatkan Jared Kushner untuk mencapai kepentingan bisnis keluarganya.

1.7.2 Epistemic Community and Knowledge Based Experts

Selanjutnya, Jacobs dan Page menjelaskan bahwa penelitian mengenai komunitas epistemik menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat dan ketidakpastian masalah global telah mengarahkan pembuat kebijakan (*decision makers*) untuk beralih ke saluran saran yang baru dan berbeda, secara khusus ke jaringan pakar berbasis pengetahuan baru, lembaga *think tank*, dan lainnya.³² Keahlian dari para pakar (teknokrat) dapat mengartikulasikan penyebab masalah internasional secara obyektif, serta dampak terhadap kepentingan negara dan berusaha dalam menemukan solusi kebijakan yang tepat.

Menurut Peter M. Haas, berpendapat bahwa kelompok epistemik dapat diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari ilmuwan yang dalam gagasannya memiliki keterkaitan dengan lembaga untuk memahami aktor terkait perumusan

³² Lawrence R. Jacobs dan Benjamin I. Page. 2005 : 108.

gagasan, dan keadaan, sumber daya dan mekanisme. Di mana ide-ide baru diperkenalkan sebagai doktrin kebijakan yang berkembang pada proses politik. Kelompok epistemik juga merujuk kepada suatu jaringan yang beranggotakan profesional dengan keahlian dan kompetensi pada bidang tertentu dan memiliki klaim yang bersifat otoritatif dalam proses pembuatan kebijakan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.³³ Haas juga menambahkan dengan disediakannya ruang bagi para pakar ini dapat memberikan mereka akses ke dalam sistem politik dan terlibat dalam penetapan agenda dan perumusan alternatif kebijakan.

Keterlibatan komunitas epistemik dalam kajian *Foreign Policy Analysis* (FPA), yang dapat dipahami sebagai langkah strategis bagi negara dalam politik internasional. Keberadaan komunitas epistemik memiliki dua implikasi yang penting. *Pertama*, pengetahuan dari para ahli dapat melengkapi pejabat pemerintah dalam melakukan analisis untuk mencapai keputusan yang dapat terlepas dari tekanan langsung kelompok-kelompok kepentingan. Dalam hal ini kelompok bisnis akan memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. *Kedua*, komunitas epistemik dapat berfungsi sebagai mekanisme konkrit untuk mengidentifikasi dan menangani kepentingan obyektif negara. Singkatnya, keberadaan kelompok epistemik dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri dapat menghasilkan insentif yang kuat bagi pemerintah, terkhususnya para pembuat kebijakan (*decision makers*) dalam membuat

³³ Peter M. Haas. "Policy Knowledge: Epistemic Communities", In N.J. Smelser & Baltes (eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. 2001.

kebijakan luar negeri, terutama dengan merespon pendapat dari para pakar (ahli), seperti lembaga *think tank*, akademisi, dan para profesional yang terlatih.

Pada pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang inkonsisten terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi juga dipengaruhi oleh kelompok epistemik. Salah satu lembaga *think tank* Amerika Serikat yang berfokus pada kawasan Timur Tengah, yakni The Washington Institute for Near East Policy (WINEP).³⁴ Banyak pakar yang memberikan analisisnya dalam memandang krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi. Di antaranya memberikan analisis pilihan rekomendasi kebijakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

1.7.3 Median Voter Theory and the Influence of Public Opinion

Pada pembahasan ini, Jacobs dan Page menjelaskan keberadaan opini publik dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh media dalam membingkai berbagai isu-isu yang menonjol. Bukti empiris pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri terus berkembang melalui berbagai pendekatan. Misalnya, dalam analisis pendekatan kuantitatif menunjukkan, sebesar 62 persen kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah berubah ke arah yang sama dengan preferensi publik.³⁵

Gagasan respon pemerintah terhadap opini publik memunculkan penelitian mengenai “perdamaian demokratis”. Di mana telah menemukan kecenderungan yang

³⁴ Official Website of The Washington Institute for Near East Policy: Improving the Quality of U.S Middle East Policy. <https://www.washingtoninstitute.org/>

³⁵ Lawrence R. Jacobs dan Benjamin I. Page. 2005 : 109.

pasif bagi negara-negara demokratis ketimbang negara-negara non demokratis.³⁶ Pada penelitian mengenai perdamaian demokratis, berpendapat bahwa pemilihan umum yang kompetitif membuat para pemimpin yang demokratis sensitif terhadap opini publik. Hal ini dikarenakan para politisi mengantisipasi ancaman tindakan publik yang dapat mengeluarkan mereka dari jabatan karena tidak responsif. Selain itu masyarakat di negara demokratis cenderung memengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung melalui opini publik dan tidak langsung melalui perwakilan mereka.³⁷

Di samping itu juga muncul indikasi yang mengatakan bahwa perbedaan karakteristik lembaga pemerintah cenderung menghasilkan tingkat pengaruh yang berbeda oleh publik. Kaum realisme klasik menentang pendapat tersebut dan yang mendesak para pembuat kebijakan (*decision makers*) untuk tidak menanggapi preferensi publik. Karena dikhawatirkan keterlibatan publik dalam pemikiran moralistik dan legalistik dalam realitas politik internasional akan menunjukkan ketidakstabilan secara cepat. Pendapat ini juga diperkuat oleh Walter Lippman yang mengatakan bahwa jika pembuat kebijakan (*decision makers*) merespon preferensi publik, maka akan menciptakan kekacauan dari fungsi kekuasaan yang sebenarnya.

³⁶ Bruce Russett and John Oneal. *Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations*. (New York: W. W. Norton, 2001).

³⁷ Susan Peterson. "How Democracies Differ: Public Opinion, State Structure, and the Lessons of the Fashoda Crisis" Artikel *Jurnal Security Studies, Vol. 5 Issues 1 (Autumn)*. 1995 DOI: <https://doi.org/10.1080/09636419508429251>. (diakses pada 5 Maret 2020) : 10-11.

Serta menghasilkan kebijakan yang justru dapat memamatkan kelangsungan hidup negara.³⁸

Dalam melihat persepsi publik Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset YouGov untuk surat kabar Arab News menunjukkan hasil dari jajak pendapat publik Amerika Serikat terhadap hubungan Amerika Serikat-Qatar, hubungan Amerika Serikat-Arab Saudi, hubungan Amerika Serikat-UEA.³⁹

Dari ketiga indikator yang penulis paparkan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tersebut akan dioperasionalisasikan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pembahasan akan dipaparkan melalui ketiga indikator konsep, namun pembahasan lebih didominasi kepada indikator pertama, hal ini didasarkan kepada asumsi penulis yang melihat indikator pertama sebagai faktor yang dominan dalam memengaruhi Amerika Serikat dalam perubahan orientasi kebijakan luar negeri terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu penelitian yang bermaksud tidak hanya sekadar memberikan gambaran mengenai

³⁸ Walter Lippman. *Public Opinion: With a New Introduction by Michael Curtis (Second Edition)*. (New Brunswick, New Jersey: The Macmillan Company, 1992).

³⁹ Adam Taylor. "Do Americans actually care about the Qatar crisis? A new poll present a mixed picture". Artikel The Washington Post. 2017. <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/08/08/do-americans-actually-care-about-the-qatar-crisis-a-new-poll-presents-a-mixed-picture/> (diakses pada 12 Februari 2020).

realitas sosial tertentu yang menjadi fokus bahasan, tetapi untuk mengetahui bagaimana hubungannya dengan realitas sosial lainnya serta mencari tahu mengapa hubungannya seperti itu. (hubungan sebab-akibat).⁴⁰ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang berfokus terhadap aspek pencarian makna dibalik realitas yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu fenomena yang terjadi dan tidak berdasarkan kepada pengukuran angka.⁴¹

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memiliki fokus bahasan. Tujuannya agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan. Penulis membatasi pada gambaran mengenai dinamika krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi dan penjelasan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi. Selain itu, penulis juga membatasi alokasi waktu penelitian dimulai dari tahun 2017 dan tahun 2019 sebagai batas akhir penelitian. Dikarenakan pada tahun tersebut hubungan antara Qatar dan negara-negara Teluk mulai kembali stabil yang ditandai oleh serangkaian pertemuan antar pihak-pihak yang terlibat meskipun penyelesaiannya belum dapat dikatakan sempurna.

⁴⁰ Emy Susanti. *Tahapan & Teknik Penulisan Proposal Penelitian Sosial*, FISIP PSG-LPI Universitas Airlangga, 2019.

⁴¹ Gary King. *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. (New Jersey: Princeton University Press, 1994).

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berangkat dari pengertian bahwa unit analisis merupakan unit yang hendak dideskripsikan perilakunya,⁴² atau disebut sebagai variabel dependen. Di mana pada penelitian ini, objek yang akan menjadi unit analisis adalah Amerika Serikat. Selanjutnya untuk unit eksplanasi sendiri merupakan objek yang memengaruhi unit analisis atau biasa disebut dengan variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi unit eksplanasinya adalah krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi. Krisis diplomatik yang terjadi, kemudian memengaruhi Amerika Serikat untuk terlibat dan mengeluarkan kebijakan luar negeri. Kemudian untuk tingkat analisis dalam penelitian ini adalah berada pada level negara. Dikarenakan dalam penelitian ini, penulis terfokus pada faktor yang memengaruhi Amerika Serikat mengeluarkan perubahan orientasi kebijakan luar negeri dalam keterlibatannya terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode berbasis dokumen melalui pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan berupa jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian ataupun laporan.⁴³ Selain itu artikel penelitian mengenai dinamika krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis, dan

⁴² Mochtar Mas'ood. "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". (Jakarta: LP3ES, 1990) : 35.

⁴³ P.Joko Subagyo, SH. "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek". (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991) : 87-88.

indikator-indikator yang memengaruhi pemerintah Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan luar negerinya terutama dalam melihat krisis tersebut. Selain itu data juga dikumpulkan dari berbagai buku, skripsi, *website* berita; *Al-Jazeera*, *Arab News*, *Reuters*, *BBC News*, *The Guardian*, *The New York Times*, *The Washington Post*, dan sebagainya. Serta artikel-artikel analisis kebijakan luar negeri yang dipublikasikan oleh lembaga riset dan *think tank*, hingga pernyataan resmi pemerintah yang diperoleh melalui situs resmi pemerintahan Gedung Putih.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, penulis melakukan teknik analisis data. Teknik analisis data akan membantu penulis dalam mengelaborasi permasalahan pada penelitian. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.⁴⁴ Tahapan analisis yang penulis lakukan melalui empat tahap. *Pertama*, proses pengelompokan data. *Kedua*, proses reduksi data. *Ketiga*, proses penyajian data. *Terakhir*, proses penarikan kesimpulan. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti; penyebab terjadinya krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, kemunculan Amerika Serikat yang terlibat dalam krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi. Setelah dikelompokkan, penulis akan menyeleksi data-data yang sekiranya tidak terlalu relevan dengan kebutuhan

⁴⁴ Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman. *“Designing Qualitative Research”*. (California: SAGE Publication, 1999) : 150.

penelitian. Dengan menggunakan metode *skimming* dan *scanning* untuk menemukan ide pokok dari setiap bahan bacaan secara garis besar.

Metode *skimming* merupakan keterampilan membaca dengan kecepatan tinggi yang bertujuan untuk mencari ide pokok pada suatu bacaan, caranya yakni membaca bacaan secara sekilas dan cepat untuk memperoleh kesan secara keseluruhan dan umum. Sedangkan *scanning* merupakan teknik membaca dengan cepat untuk mendapat suatu informasi tanpa membaca jenis bacaan lainnya.⁴⁵ Kedua metode ini penulis gunakan untuk mempermudah dalam proses mendapatkan data yang lebih spesifik. Berikutnya, menyajikan data-data tersebut berdasarkan pemahaman yang dimiliki penulis. *Terakhir*, penarikan kesimpulan berdasarkan indikator yang terdapat dalam konsep yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II Dinamika Krisis Diplomatik Qatar-Arab Saudi dan Kepentingan Amerika Serikat.

⁴⁵ Yurissa Icha. “*Pengertian Skimming dan Scanning – Tujuan, Manfaat, dan Langkahnya Lengkap*”. Artikel ruangguru.com. 2019. <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-skimming-dan-scanning-tujuan-manfaat-dan-langkahnya-lengkap/> (diakses pada 22 Maret 2020).

Bab ini memuat penjelasan mengenai dinamika hubungan diplomatik Qatar-Arab Saudi yang berujung kepada krisis. Serta penjelasan kepentingan yang ingin dicapai Amerika Serikat dalam keterlibatannya terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi.

BAB III Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Krisis Diplomatik Qatar-Arab Saudi tahun 2017-2019.

Bab ini berisi pemaparan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam menyikapi krisis yang terjadi antara Qatar-Arab Saudi dalam hubungan diplomatiknya. Serta perubahan orientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan cenderung tidak konsisten.

BAB IV Analisis Faktor Perubahan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Krisis Diplomatik Qatar-Arab Saudi.

Bab ini berisi analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi dengan mengacu kepada indikator-indikator yang terdapat dalam konsep yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.